

EFEKTIVITAS PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN KUT POLA KHUSUS

Oleh:

Bunasor Sanim¹⁾

Abstract

The government of Indonesia has implemented a new credit scheme for farmers, KUT Special Scheme (KUT SS) in order to support food self-sufficiency program. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of KUT SS for farmers. This study employed before and after the KUT SS implemented to farmers. Primary data obtained by interviewing farmers, farmer groups, field extension agencies, cooperative village unit, technical administration staff, and banks involved in KUT SS. The data were analyzed by descriptive method and econometric statistics technique (simple multiple regression analysis). The study shows that farmers preferred to receive KUT SS in cash money, not in a physical form such as fertilizer, seeds, herbicides and pesticides. Farmers also preferred to return back the KUT SS to their farmer group instead of the bank or cooperative village unit. The KUT SS has successfully increased farmers' production and income. The study find that factors affecting collectability of credit are level of farmer group class, farmer's experience on taking the credit before, savings in KUD or farmer group, participation in making RDKK, kind of credit, time of taking credit, frequency of meeting, commodity, acreage of farmer, and frequency of extension from PPL and KUD.

Key words : agricultural credit, special scheme KUT, effectiveness of credit.

Abstrak

Dalam rangka mendukung swasembada pangan, pemerintah telah mengeluarkan skim kredit baru yang disebut Kredit Usaha Tani Pola Khusus (KUT PK). Salah satu perbedaan paling menonjol antara KUT PK dengan KUT yang sudah dijalankan adalah dipersingkatnya prosedur peminjaman dari 12 tahap menjadi hanya tiga tahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemberian KUT PK terhadap petani. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik petani penerima KUT PK; dan (2) Mengevaluasi efektivitas pemberian KUT PK terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani. Pengukuran penelitian dilakukan dengan metode sebelum dan setelah pemberian kredit. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dari petani, kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Koperasi Unit Desa (KUD), tenaga teknis administratif (TTA), dan bank pemberi KUT PK. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada peranan (pangsa) pemberi KUT PK, jumlah bank pemberi KUT, serta cukup mewakili wilayah Indonesia. Khusus penarikan sampel petani penerima KUT PK dilakukan berdasarkan *two stages stratified random sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif tabulasi dengan metode statistik ekonometrik (regresi ganda sederhana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani lebih menyukai pemberian kredit dalam bentuk tunai dan mengembalikan kredit melalui kelompok tani daripada ke bank dan KUD. Selanjutnya KUT PK telah memberikan dampak positif bagi petani dalam peningkatan produksi dan pendapatan

Kata Kunci: Kredit pertanian, KUT Pola Khusus, dan efektivitas kredit.

1) Staf Pengajar Jurusan Sosek Pertanian IPB

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung swasembada pangan, terutama guna meningkatkan produksi padi dan palawija serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani, pemerintah telah memperkenalkan skim Kredit Usaha Tani (KUT), yang merupakan penyempurnaan kredit BIMAS. Program KUT tersebut bertujuan membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya untuk dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, sekaligus membantu Koperasi Unit Desa (KUD) sehingga dapat berperan sebagai suatu kekuatan ekonomi yang handal di pedesaan.

Dalam empat tahun terakhir, rata-rata pemberian KUT per tahun sekitar Rp 62 milyar. Apabila dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia, maka penyerapan KUT relatif rendah dan berkembang lambat. Penyebab utama hal ini adalah tingginya tunggakan, antara lain sebagai akibat terjadinya bencana alam dan serangan hama, kurang baiknya seleksi petani penerima kredit, maupun kelemahan manajemen beberapa KUD. Keadaan tersebut menyebabkan KUD sebagai penerima kredit tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KUT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya untuk lebih memperlancar dan meningkatkan penyaluran KUT oleh perbankan kepada petani, maka pada bulan April 1995 dikeluarkan skim KUT Pola Khusus untuk mendampingi ketentuan KUT yang saat ini berlaku (KUT Pola Umum). Dalam KUT Pola Khusus, tunggakan kredit pada KUD tidak dijadikan persyaratan lagi, karena sebagai penerima kredit adalah kelompok tani binaan KUD. Selain itu, KUD bertindak sebagai koordinator dan pembina kelompok tani tersebut, sekaligus membantu bank dalam penyaluran kredit kepada kelompok tani. Hal yang menonjol dalam skim yang baru ini adalah dalam hal prosedur pengajuan kredit oleh petani, yang dalam KUT Pola Umum diperlukan 12 tahap, kini dalam KUT Pola Khusus hanya diperlukan tiga tahap saja (Sanim, dkk., 1997).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemberian KUT Pola Khusus terhadap petani. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengidentifikasi karakteristik petani penerima KUT Pola Khusus;
2. mengetahui efektivitas pemberian KUT Pola Khusus terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani;
3. mengetahui tingkat pengembalian KUT Pola Khusus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode sebelum dan setelah proyek (*before and after project*), dalam hal ini dengan meneliti keadaan petani dan usaha taninya sebelum dan setelah memperoleh KUT Pola Khusus. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dari petani, kelompok tani, petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), Koperasi Unit Desa (KUD), tenaga teknis administrasi (TTA) dan bank pemberi KUT. Data pendapatan petani pada saat sebelum menerima KUT PK adalah data pendapatan pertengahan tahun 1996, sedangkan data pendapatan petani setelah menerima KUT PK

adalah data pendapatan awal tahun 1997. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah menerima KUT PK. Data sekunder antara lain profil perkembangan usaha tani yang bersumber dari kelompok tani, koperasi dan bank.

Pemilihan Sampel

Realisasi KUT Pola Khusus pada akhir Maret 1996 telah mencapai 70,9 miliar yang disalurkan di tujuh propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung dan Sulawesi Selatan. Jumlah bank yang menyalurkan kredit KUT Pola Khusus adalah 14 bank. Sebagian besar kredit KUT Pola Khusus disalurkan untuk padi sebesar 96,4 persen, diikuti dengan palawija sebesar 3,0 persen dan hortikultura sebesar 0,6 persen (Sanim, dkk., 1997).

Berdasarkan realisasi penyaluran KUT Pola Khusus tersebut, maka penentuan daerah penelitian didasarkan pada daerah dan komoditas yang dominan dalam memperoleh kredit. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada peranan (pangsa) pemberian KUT Pola Khusus, jumlah bank pemberi KUT dan jangka waktu pelaksanaan pemberian KUT Pola Khusus (dua musim tanam).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan di empat propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dari masing-masing propinsi dipilih satu kabupaten yang telah menggunakan KUT Pola Khusus dan dipertimbangkan dapat mewakili daerah lainnya untuk ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan sampel petani berdasarkan *two stages stratified random sampling*, yaitu stratifikasi berdasarkan daerah administrasi (kecamatan dan desa) dan stratifikasi berdasarkan lahan (lahan irigasi, lahan tadah hujan dan lahan kering). Dari masing-masing kabupaten dipilih sebanyak 152 petani. Jumlah ini lebih kecil dari 5 persen populasi sehingga dapat memenuhi asumsi distribusi normal dengan mengingat sampel yang diambil secara *random*. Selanjutnya, untuk pemilihan sampel kelompok tani, PPL, KUD dan bank dilakukan secara *random* dengan mengikuti sampel petani. Khusus alokasi sampel untuk tenaga teknis administrasi (TTA) dilakukan berdasarkan ketersediaan TTA pada setiap bank penyalur KUT Pola Khusus. Tabel 1 dan 2 di bawah ini menunjukkan realisasi penyaluran KUT Pola Khusus di daerah sampel dan alokasi penyebaran sampel.

Tabel 1. Realisasi Penyaluran KUT Pola Khusus di Daerah Sampel, Tahun 1996/1997.

No	Propinsi	Lokasi	Realisasi Kredit KUT PK			
			Bank	KUD	Kelompok Tani (KT)	Petani
1	Jawa Timur	Malang	3	55	430	19.526
		Kediri	2	71	1.120	29.600
2	Jawa Barat	Garut	1	17	187	5.610
		Cirebon	2	35	412	4.237
3	Lampung	Lampung	1	109	1254	35.621
4	Sulawesi Selatan	Ujung Pandang	1	239	1900	57.981

Tabel 2. Alokasi Penyebaran Sampel di Daerah Sampel, 1996/1997

No	Propinsi	Lokasi	Jumlah Sampel						
			Bank	KUD	KT	Ptni	TTA	PPL	Jlh
1	Jawa Timur	Malang	2	6	10	30	4	6	58
		Kediri	1	2	6	2	2	2	37
2	Jawa Barat	Garut	1	2	4	16	2	1	26
		Cirebon	2	3	6	24	2	2	39
3	Lampung	Lampung	1	2	8	30	2	2	45
4	Sulawesi Selatan	Ujung Pandang	1	2	8	28	2	2	43
Total			8	17	42	152	14	15	248

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif tabulasi dan ekonometrik. Metode ekonometrik dipergunakan untuk melihat sejauh mana kredit mampu meningkatkan pendapatan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembaliannya. Untuk melihat pengaruh KUT Pola Khusus terhadap pendapatan dilihat dengan menggunakan pendekatan regresi sebagai berikut:

$$I = \beta_0 + \sum \beta_i X_i + \epsilon_i \quad i = 1, \dots, 4 \quad (1)$$

di mana :

- I = Pendapatan bersih usaha tani (000 Rp/Ha)
- X1 = Sap = Biaya yang dikeluarkan untuk saprodi (000 Rp/Ha)
- X2 = TK = Biaya yang dikeluarkan tenaga kerja (000 Rp/Ha)
- X3 = Oth = Biaya yang dikeluarkan petani untuk input lainnya (000 Rp/Ha)
- X4 = D.Kredit = Peubah boneka untuk kredit; "0" sebelum petani menerima KUT Pola Khusus dan "1" setelah petani menerima KUT Pola Khusus.
- β_0 = Konstanta
- ϵ = Error

Perlu dikemukakan di sini bahwa model regresi ganda di atas menggunakan semua data pendapatan dari petani responden, termasuk data pendapatan negatif. Model ini dilandasi asumsi bahwa petani yang memperoleh KUT PK mempunyai keterbatasan modal. Dengan demikian apabila petani mempunyai kesempatan meningkatkan penggunaan *input* maka produksinya akan meningkat. Dengan demikian, pendapatan bersih petani akan meningkat pula. (Adams, 1984). Penggunaan peubah boneka di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan dan berapa besarnya perbedaan tersebut (Hardy, 1993). Selain itu penggunaan *input* diproksi dari jumlah biaya yang dikeluarkan dengan pertimbangan :

1. Petani lebih mengingat jumlah biaya yang dikeluarkan untuk satuan *input* tertentu daripada jumlah fisik *input* yang digunakan pada MT sebelumnya;
2. Dalam mengestimasi persamaan regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel penjelas akan lebih baik apabila satuannya sama atau dapat pula dikonversikan semua dalam per hektar (Kmenta, 1977).

Untuk nilai produksi dan biaya ini memang tidak diperhitungkan faktor inflasi. Hal ini mengingat banyaknya komponen biaya yang dianalisis serta perbedaan lokasi penelitian. Pertimbangan lainnya adalah selisih waktu sebelum dan sesudah petani menerima KUT lebih kurang delapan bulan (dua musim tanam). Selain itu, bila terdapat kekhawatiran peningkatan pendapatan bersih tersebut mungkin saja karena faktor inflasi dapat dikurangi, mengingat peningkatan harga *input* (benih, pupuk, obata-obatan, tenaga kerja dll.) lebih cepat dibandingkan peningkatan harga *output* dalam kurun waktu penelitian ini. Oleh karenanya, apabila dilakukan pendeflasiian terhadap pendapatan bersih, dengan bobot deflasi untuk biaya yang lebih besar, maka peningkatan pendapatan bersih tidak mustahil lebih besar lagi.

Selanjutnya untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peluang pengembalian dilakukan analisis dengan menggunakan model peluang linier^{*)} (Adriani., 1996) dengan peubah dependen biner (*model with binary variable*) yang diformulasi sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \sum \beta_i X_i + \epsilon_i \quad i = 1, \dots, 14 \quad (2)$$

di mana;

Y adalah peluang pengembalian kredit, yang bernilai di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan petani belum melunasi kredit (menunggak) dan nilai 1 menunjukkan petani sudah melunasi kredit. Untuk X_i , terdiri dari :

X_1 = Mad adalah Kelas keanggotaan di kelompok tani (KT), di mana

$X_1 = 0$: Petani dengan status keanggotaan madya

$X_1 = 1$: Petani dengan status lainnya

X_2 = Ljt adalah Kelas keanggotaan di kelompok tani (KT);

$X_2 = 0$: Petani dengan status keanggotaan lanjut

$X_2 = 1$: status lainnya (catatan : tidak ada petani dengan status utama)

X_3 = KUT adalah *variabel dummy* petani yang pernah memperoleh KUT Umum/tidak;

$X_3 = 0$: Petani yang pernah memperoleh KUT Umum

$X_3 = 1$: Petani yang belum pernah memperoleh KUT Umum

Model peluang linier mengandung beberapa kelemahan, diantaranya dengan peluang dapat negatif atau lebih besar dari satu yang tidak sesuai dengan prinsip statistik. Model yang lebih baik ialah model logit atau profit (Red).

X_4 = T.KUD adalah variabel *dummy* petani yang mempunyai tabungan di KUD/tidak;

$X_4 = 0$: Petani yang mempunyai tabungan di KUD

$X_4 = 1$: Petani yang tidak mempunyai tabungan di KUD

Keterangan: *) Model peluang linier mengandung beberapa kelemahan, diantaranya dugaan peluang dapat negatif atau lebih besar dari satu yang tidak sesuai dengan prinsip statistik. Model yang lebih baik ialah model logit atau profit (Red).

X5 = T.KT adalah *variabel dummy* petani yang mempunyai tabungan di KT/ tidak;

X5 = 0: Petani yang mempunyai tabungan di KT

X5 = 1: Petani yang tidak mempunyai tabungan di KT

X6 = RDKK adalah *variabel dummy* petani yang menyusun RDKK atau tidak;

X6 = 0: Petani yang ikut menyusun RDKK

X6 = 1: Petani yang tidak ikut menyusun RDKK

X7 = Tni adalah *variabel dummy* untuk bentuk kredit yang diterima petani;

X7 = 0: Petani yang menerima kredit dalam bentuk tunai

X7 = 1: Petani yang menerima kredit dalam bentuk lainnya

X8 = MT adalah *variabel dummy* untuk waktu petani menerima kredit;

X8 = 0: Petani yang menerima kredit sebelum MT

X8 = 1: Petani yang menerima kredit setelah MT

X9 = Temu adalah *variabel dummy* petani yang ikut dalam pertemuan KT;

X9 = 0: Petani yang ikut dalam pertemuan setiap bulan

X9 = 1: Petani lainnya

X10 = Kmdt adalah *variabel dummy* komoditas yang ditanam petani setelah menerima kredit;

X10 = 0: Petani yang menanam palawija

X10 = 1: Petani yang menanam padi

X11 = S.lhn adalah *variabel dummy* status lahan yang digunakan petani untuk kredit;

X11 = 0: milik orang lain

X11 = 1: milik sendiri

X12 = B.KUD adalah Frekuensi pembinaan KUD setiap bulan

X13 = B.PPL adalah Frekuensi pembinaan PPL setiap bulan

X14 = L.lhn adalah Luas lahan yang dibiayai dari kredit yang diterima (Ha)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Penerima KUT Pola Khusus (KUT PK)

Sebagian besar petani sampel penerima KUT PK (94,08 %) yang tergabung di dalam kelompok tani adalah merupakan anggota KUD. Berdasarkan status keanggotaan tersebut diharapkan petani telah terlibat secara aktif sejak proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) hingga pemanfaatan KUT PK yang diperoleh. Selain itu sebagian petani (36,84 %) menyatakan pernah menerima KUT Pola Umum dan 24,34 persen petani telah menerima jenis kredit lainnya.

Karakteristik petani lainnya, khususnya yang terkait dengan proses pengembalian kredit adalah tabungan. Sebanyak 50,66 persen petani menyatakan mempunyai tabungan di KUD (di luar program KUT), namun hanya 34,21 persen petani yang mempunyai tabungan di kelompok tani. Dalam hubungannya dengan penyusunan RDKK, ternyata

hanya 57,89 persen petani yang menyatakan mengetahui RDKK dan hanya sepertiganya saja petani yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan RDKK.

Petani lebih menyukai pemberian kredit dalam bentuk tunai (63,13 %). Hal ini disebabkan bentuk tunai dapat dimanfaatkan untuk keperluan sarana produksi tertentu. Gambaran ini mungkin disebabkan petani khawatir sarana produksi yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Namun dalam penyalurannya penelitian menunjukkan bahwa petani menerima dalam bentuk tunai (26,97 %), saprodi (26,97 %), dan tunai dan saprodi (59,24 %). Dari petani yang menerima tunai dan saprodi, komposisi tunai adalah 34,74 persen dan saprodi adalah 66,67 persen. Waktu penerimaan kredit tersebut adalah sebelum musim tanam (MT) sebanyak 40,79 persen diikuti dengan pada saat MT dan setelah MT berturut-turut adalah 7,89 dan 51,32 persen. Dalam hal pengembalian kredit, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani (96,05 %) melakukan pengembalian melalui ketua atau pengurus kelompok tani dan hanya sedikit sekali (3,29 %) yang melakukan pengembalian langsung ke kantor cabang bank pemberi kredit. Periode waktu pengangsuran kredit yang dilakukan oleh petani sangat bervariasi antara lain dilakukan sesuai jadwal yang disepakati sebanyak 23,03 persen atau dua kali pengangsuran. Besar angsuran oleh petani pada setiap melakukan angsuran bergantung pada: kesepakatan saat akad kredit (55,26 %), sesuai hasil panen (32,89 %), atau bergantung pada kesanggupan petani. Adapun sumber dana yang digunakan petani dalam pengembalian kredit sebagian besar petani (59,79 %) memanfaatkan hasil tanaman yang dibiayai KUT PK serta dari tanaman lain (22,37 %). Sisanya, 13,84 persen petani mengembalikan KUT PK dari usaha nonpertanian.

Sebagian besar petani hadir dalam pertemuan kelompok satu kali dalam satu bulan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani (71,05 %) memperoleh pembinaan dari KUD. Pembinaan yang dilakukan terutama kunjungan rutin setiap bulan. Bentuk pembinaan dari KUD yang umumnya diperoleh petani adalah penyaluran sarana produksi, pembinaan manajemen usaha dan administrasi keuangan, pembinaan pemasaran, dan pembinaan dalam penyusunan RDKK.

Dalam kaitannya dengan pembinaan yang dilakukan oleh PPL, sebagian besar petani (88,64 %) menyatakan memperoleh pembinaan dari PPL. Frekuensi kunjungan yang dilakukan oleh PPL rata-rata tiga kali per bulan, dengan kisaran frekuensi dari satu kali per bulan di Jawa Timur dan Jawa Barat hingga tujuh kali per bulan di Sulawesi Selatan. Materi pembinaan yang umumnya diperoleh petani adalah teknik produksi, penyusunan RDKK dan pembinaan dalam hal manajemen usaha dan pemasaran.

Efektivitas Pemberian KUT Pola Khusus Terhadap Pendapatan Petani

KUT Pola Khusus dimaksudkan untuk meningkatkan akses permodalan petani. Efektivitas KUT Pola Khusus dalam peningkatan produktivitas dan produksi usaha tani sangat ditentukan oleh sejauh mana modal kerja yang diterima petani benar-benar digunakan untuk keperluan usaha taninya.

Tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan penyaluran KUT Pola Khusus di antaranya adalah melihat sejauh mana dampak kredit yang disalurkan terhadap produksi dan pendapatan petani (Kane, 1984). Penerapan KUT Pola Khusus diharapkan agar petani dapat melakukan intensifikasi sehingga produksinya meningkat yang

selanjutnya bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Perbandingan produksi dan pendapatan petani sebelum dan sesudah diterapkannya KUT Pola Khusus dapat dijadikan pembahasan apakah pemberian KUT Pola Khusus tersebut berdampak negatif atau positif terhadap produksi maupun pendapatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya KUT Pola Khusus telah berhasil meningkatkan pendapatan bersih petani hingga 44,89 persen (lihat Tabel 3). Pendapatan bersih yang dimaksudkan di sini adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi, yang terdiri dari biaya sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida), biaya tenaga kerja (dalam dan luar keluarga) dan biaya untuk pengeluaran lainnya (iuran irigasi, PBB).

Tabel 3 memperlihatkan bahwa sebelum menerima kredit, pendapatan rata-rata petani adalah sebesar Rp 657.779 per hektar. Nilai tersebut meningkat menjadi sebesar Rp 953.039 per hektar setelah petani menerima bantuan KUT Pola Khusus. Selanjutnya, hal yang menarik dari Tabel 3 di atas adalah adanya KUT PK telah meningkatkan pendapatan lebih dari tiga kalinya di beberapa daerah, seperti di Lampung dan Malang.

Terlepas dari masih besarnya persentase kelompok tani yang menunggak dan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan KUT Pola Khusus, serta permasalahan kegagalan panen karena faktor alam, maka secara umum tujuan KUT Pola Khusus untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan bersih dari usaha tani dapat dikatakan telah tercapai. Secara empiris, jika faktor-faktor lain selain saprodi adalah tetap, maka peningkatan penggunaan saprodi yang optimal akan meningkatkan produktivitas. Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa dengan adanya KUT Pola Khusus, maka secara rata-rata jumlah penggunaan saprodi telah meningkat sebanyak 2,5 kali (dari rata-rata Rp 139.753 per Ha sebelum KUT Pola Khusus menjadi rata-rata Rp 354.185 per Ha setelah menerima KUT Pola Khusus). Secara kuantitas, tingkat produksi padi secara-rata-rata meningkat dari 3.446 Kg/Ha (dengan kisaran 928 - 7.000 Kg/Ha) menjadi 3.518 Kg/Ha (dengan kisaran 500 - 7.500 Kg/Ha) setelah menerima KUT PK.

Tabel 3. Perbandingan Penggunaan Sarana Produksi Padi dan Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Menerima KUT PK, Tahun 1996/1997.

Item	Sebelum KUT PK (Rp/Ha)	Sesudah KUT PK (Rp/Ha)	Peningkatan (Rp/Ha)	Persentase Peningkatan (%)
Penggunaan Saprodi	139.573	354.186	214.433	153,44
Pendapatan Rata-rata	657.779	953.039	295.260	44,89

Untuk menelaah pengaruh pemberian KUT Pola Khusus terhadap pendapatan petani, data yang dikumpulkan di lapangan dianalisis dengan mempergunakan model regresi ganda sederhana seperti yang tertuang dalam persamaan (1). Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$I_i = 262 + 1,15 \text{ Sapi} + 0,127 \text{ TK}_i + 3,86 \text{ Oth}_i + 341 \text{ D. Kredit}_i$$

Model regresi ganda tersebut di atas secara statistik cukup baik, antara lain ditunjukkan oleh nilai statistik F sebesar 22,49 yang nyata pada taraf kepercayaan ($\alpha = 0,001$,

dengan koefisien determinasi $R^2 = 66,2$ persen dan R^2 (adj.) = 65,1 persen. Peubah-peubah yang diduga mempengaruhi pendapatan usaha tani secara nyata dapat dilihat pada nilai-nilai koefisien pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Dampak Pemberian Kredit Usaha Tani PK terhadap Pendapatan Petani

Penduga	Koefisien	t-Rasio
Konstanta	261,5	1,49
Sap	1,1508	1,40
TK	-0,1268	-0,59
Oth	3,8609	8,76
D. Kredit	340,5	1,68
R^2 (%)	66,2	
R^2 (adj) (%)	65,1	

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa kecuali variabel tenaga kerja (TK), maka koefisien variabel biaya saprodi (Sap) secara statistik nyata pada taraf $\alpha = 0,20$; biaya lain (Oth.) nyata pada taraf $\alpha = 0,001$ serta peubah boneka (D. Kredit) nyata pada taraf $\alpha = 0,10$. Variabel tenaga kerja dalam hal ini tidak signifikan, karena dalam usaha tani, seringkali memberikan sumbangan negatif dalam pendapatan seperti diungkapkan oleh Saragih dan Sunito (1994). Hal ini disebabkan petani (dan keluarganya) mencurahkan seluruh tenaga kerjanya untuk usaha taninya tanpa memperhitungkan pengembalian atas faktor produksi tersebut dari pendapatan usaha taninya.

Berdasarkan model regresi ganda tersebut, maka peningkatan pemakaian sarana produksi sebesar satu rupiah akan dapat meningkatkan pendapatan bersih sebesar Rp 1.150. Dengan demikian upaya pemberian kredit yang dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan saprodi memang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani. Variabel biaya lainnya mempunyai koefisien estimasi sebesar 3,86. Hal ini berarti peningkatan biaya lainnya sebesar satu rupiah akan dapat meningkatkan pendapatan sebesar Rp 3,860. Peningkatan biaya lainnya, ini yang meliputi antara lain PBB dan iuran irigasi adalah sebagai akibat bertambahnya luas lahan yang diusahakan. Dalam kaitannya dengan penyaluran KUT Pola Khusus; adanya KUT Pola Khusus diharapkan pula akan meningkatkan luas lahan yang diusahakan, sehingga pendapatan petani meningkat.

Selanjutnya Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa keberadaan KUT PK memberikan dampak yang nyata terhadap pendapatan petani. Diduga kuat bahwa adanya sarana modal usaha dalam bentuk KUT Pola Khusus dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp 340,5 ribu per hektar.

Pengembalian KUT Pola Khusus dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Berdasarkan data sekunder yang bersumber dari bank pelaksana di wilayah penelitian, untuk KUT Pola Khusus yang disalurkan pada tahun 1995/1996 maka pada posisi Maret - Juni 1997 sebesar 84,12 persen dari jumlah KUD yang menyalurkan KUT Pola Khusus serta 58,4 persen dari total kelompok tani yang menerima KUT Pola Khusus

masih menunggak. Berdasarkan data primer di tingkat kelompok tani dan petani, jumlah yang menunggak adalah sebesar 54,8 persen dari total responden kelompok tani dan 35,5 persen dari total responden petani.

Bagi responden petani yang benar-benar mengaku menunggak, ternyata sekitar 35 persen karena kegagalan panen, dan selebihnya karena digunakan untuk modal musim tanam berikutnya dan untuk keperluan lain. Akan tetapi berdasarkan informasi dari salah satu responden bank, ternyata 18,34 persen dari nilai tunggakan karena dipakai oleh oknum aparat desa. Hal ini dapat saja terjadi karena masih ada KUT Pola Khusus yang salah sasaran atau penyelewengan di tingkat desa. Penelitian ini tidak dapat mengungkap apakah penunggakan tersebut juga terjadi karena penyelewengan di tingkat KUD - seperti halnya yang terjadi pada kasus KUT Umum - mengingat pengembalian kredit dari kelompok tani ke bank sebagian besar melalui KUD. Keadaan ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengembalian KUT Pola Khusus antara lain bersumber dari lemahnya mekanisme kontrol dalam pelaksanaan KUT Pola Khusus, khususnya dalam proses seleksi baik di tingkat kelompok tani maupun di tingkat KUD (faktor eksternal petani), yang sekaligus juga menunjukkan masih kurangnya pembinaan instansi terkait baik terhadap KUD, kelompok tani, dan aparat di tingkat desa.

Secara normatif, selain karena kegagalan panen, pembayaran angsuran kredit adalah otomatis tanpa harus dilakukan usaha-usaha penagihan oleh petugas bank. Walaupun demikian, ternyata dalam usaha penagihan keterlibatan pihak instansi terkait (di luar bank) masih belum optimal.

Di luar hal-hal di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian kredit oleh petani telah diestimasi dengan menggunakan data empiris dari responden petani, diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$Y = 0,946 + 0,0289 \text{ Mad} - 0,195 \text{ Ljt} - 0,133 \text{ KUT Umum} - 0,0926 \text{ Tbg KUD} - 0,106 \text{ TbgKT} \\ - 0,0779 \text{ RDKK} - 0,115 \text{ Tunai} - 0,200 \text{ Sblm MT} + 0,0623 \text{ Temu} + 0,0704 \text{ Kmdti} - 0,669 \\ \text{Stslhn} - 0,0199 \text{ BinaKUD} + 0,0636 \text{ BinaPPL} + 0,0761 \text{ Luaslhn}$$

Model regresi tersebut di atas secara statistik cukup baik, untuk menduga peluang terjadinya pelunasan atau tunggakan KUT Pola Khusus yang antara lain ditunjukkan oleh nilai statistik F sebesar 12,49 yang significant pada $\alpha = 0,01$, dengan koefisien determinasi $R^2 = 61,1$ persen dan R^2 (adj) = 56,3 persen. Peubah-peubah yang diduga mempengaruhi peluang pelunasan atau penunggakan kredit secara nyata dapat dilihat pada nilai-nilai koefisien pada Tabel 5.

Berdasarkan data pada Tabel tersebut, peubah kelas kelompok tani secara nyata berpengaruh terhadap tingkat pengembalian KUT Pola Khusus. Petani yang menjadi anggota kelompok tani kelas Lanjut mempunyai peluang pelunasan kredit lebih besar 0,19 dibandingkan dengan petani yang menjadi anggota Kelompok Pemula dan Madya. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok tani dengan kelas Lanjut merupakan kelompok tani yang relatif lebih mandiri dan kompak dengan kemampuan anggotanya dalam berusaha tani yang lebih maju, sehingga mempunyai peluang yang lebih besar untuk berhasil dalam menggunakan kredit yang diperoleh. Kelas kelompok tani yang lebih maju (kelas Lanjut atau kelas Utama) juga menunjukkan bahwa secara relatif kelompok tani tersebut lebih aktif, antara lain dalam mengadakan pertemuan dan tabungan kelompok. Melalui pertemuan

kelompok maka terjadi saling tukar menukar pengalaman dan informasi mengenai usaha tani yang dilakukan dan saling membantu dalam penyelesaian masalah. Model Ini menunjukkan bahwa petani yang aktif mengikuti pertemuan kelompok mempunyai peluang lebih besar 0,06 (walaupun secara statistik tidak nyata) dibandingkan dengan petani yang tidak aktif.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sekitar 36,8 persen responden adalah petani yang telah pernah menerima KUT Umum - yang karena KUD-nya sudah tidak memenuhi syarat maka petani yang bersangkutan tidak berkesempatan lagi untuk menerima kredit melalui KUT Umum. Karena petani pernah berpengalaman menerima KUT Umum maka wajar apabila mereka mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai penerima kredit. Di samping itu, petani yang pernah menerima KUT Umum diduga lebih memahami dalam perencanaan dan pemanfaatan fasilitas kredit. Dengan demikian, maka seperti yang ditunjukkan Tabel 5, peubah pengalaman pernah menerima dan memanfaatkan kredit (KUT Umum) memberikan peluang lebih besar 0,13 dalam pelunasan kredit dibandingkan yang belum pernah menerima dan memanfaatkan kredit. Hal ini sesuai dengan peubah di mana petani yang terlibat dalam proses penyusunan RDKK (seperti halnya yang juga dilakukan pada KUT Umum), memberikan peluang lebih besar sebesar 0,08 terhadap pelunasan kredit. Melalui keterlibatan langsung petani dalam penyusunan RDKK maka secara relatif petani yang bersangkutan lebih memahami dan lebih mampu dalam merencanakan kebutuhan *input* produksi usaha taninya. Dengan kata lain dapat diduga bahwa pemahaman tentang prosedur KUT Pola Khusus turut berpengaruh terhadap keberhasilan KUT Pola Khusus dari segi tingkat pengembalian.

Penerimaan kredit dalam bentuk saprodi di satu sisi dianggap akan memberikan jaminan bahwa kredit yang diterima lebih tepat guna dalam pengertian bahwa tidak digunakan untuk keperluan di luar usaha tani, walaupun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa saprodi yang diterima dapat saja dijual kembali untuk kebutuhan uang tunai. Akan tetapi, karena "permainan" oknum saprodi yang diterima petani adalah saprodi yang sebetulnya tidak diperlukan petani (kasus obat-obatan), penerimaan yang tidak tepat waktu, atau kualitas (kasus saprodi benih) yang jelek, maka penerimaan kredit dalam bentuk saprodi menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis, dengan berpandangan "pro-aktif" bahwa petani tidak menyalahgunakan kredit dalam bentuk tunai yang diterima, ternyata penerimaan kredit dalam bentuk tunai memberikan peluang lebih besar 0,12 terhadap pelunasan kredit. Hal ini karena petani lebih "fleksibel" dalam memanfaatkan modal kerja sesuai dengan kebutuhan usaha taninya serta saat dibutuhkan sesuai dengan tahapan pengelolaan usaha taninya. Dengan demikian bentuk tunai merupakan bentuk yang tepat dalam penyaluran KUT Pola Khusus. Selain bentuk kredit, maka saat penerimaan kredit berpengaruh nyata terhadap peluang pelunasan kredit. Model di atas menunjukkan secara nyata bahwa fasilitas kredit yang diterima petani tepat waktu, dalam pengertian sebelum musim tanam, ternyata memberikan peluang lebih besar 0,20 terhadap pelunasan kredit dibandingkan yang diterima setelah musim tanam.

Tabungan kelompok sebagai salah satu mekanisme tanggung renteng merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pengembalian KUT Pola Khusus. Sehubungan dengan mekanisme tanggung renteng ini, berdasarkan hasil survai, ternyata sekitar 37 persen responden petani bersedia membantu anggota yang menunggak, dan 42 persen diantaranya bersedia melakukan iuran sukarela dan 37 persen bersedia diambilkan dari

tabungan kelompok. Adanya tabungan di kelompok atau kemampuan petani untuk menabung di KUD menunjukkan adanya kelebihan pendapatan dari hasil usaha taninya atau menunjukkan adanya kesadaran pada petani terhadap pentingnya menabung, yang antara lain untuk menutupi kebutuhan - termasuk membayar kredit - pada saat yang diperlukan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa petani yang mempunyai tabungan di kelompok tani dan di KUD memberikan peluang lebih besar 0,11 dan 0,09 dalam pelunasan kredit dibandingkan yang tidak mempunyai tabungan.

Tabel 5. Analisis Statistik Model Regresi

Predictor	Coef	t-ratio
Constant	0,9462	7.72
Madya	0,02895	0.39
Lanjut**)	-0,19485	-2.36
KUT Umum***)	-0,13350	-1.93
Tbg.KUD****)	-0,09255	-1.35
Tbg.KT	-0,10597	-1.61
RDKK	-0,07786	-1.12
Tunai****)	-0,11504	-1.30
Sblm MT*)	-0,19992	-2.89
Temu	0,0622	-9.58
Kmdti	0,07035	0.98
Stslhn*)	-0,66942	-9.58
BinaKUD	-0,01994	-0.69
BinaPPL*)	0,06358	4.29
Luaslhn****)	0,07613	1.61
R2 (%)	61.1	-
R2 (adj) (%)	56,3	-

Keterangan : *) Nyata secara statistik pada taraf $\alpha = 0,01$
 **) Nyata secara statistik pada taraf $\alpha = 0,05$
 ***) Nyata secara statistik pada taraf $\alpha = 0,10$
 ****) Nyata secara statistik pada taraf $\alpha = 0,20$

Luas lahan yang dibiayai KUT Pola Khusus berpengaruh terhadap peluang keberhasilan pengembalian kredit, yaitu sebesar 0,08 setiap peningkatan 1 Ha. Hal ini wajar karena dengan semakin besar skala usaha tani maka biaya usaha tani semakin efisien. Selain itu karena besaran nilai KUT Pola Khusus yang diterima petani sebanding dengan luas lahan yang diusahakan, maka semakin besar luas lahan semakin besar nilai KUT Pola Khusus yang diterima petani sehingga modal kerja yang diterima lebih efektif. Selain luas lahan, status kepemilikan lahan yang dibiayai KUT Pola Khusus juga menentukan keberhasilan tingkat pengembalian. Dalam hubungan ini analisis model menunjukkan hasil yang tidak "diharapkan", karena koefisien peubah status lahan bertanda negatif, yang berarti bahwa petani yang mengusahakan lahan milik orang lain mempunyai peluang keberhasilan pengembalian kredit yang lebih besar 0,67 dibandingkan yang mengusahakan milik sendiri. Walaupun demikian, argumentasi yang dapat dikemukakan adalah bahwa melalui

mekanisme sewa atau sakap, maka terdapat *sharing* pembiayaan usaha tani dengan pemilik lahan, sedangkan untuk lahan yang sama petani memperoleh kredit KUT Pola Khusus sesuai dengan luas lahan yang digarapnya. Hal ini berarti petani yang bersangkutan mempunyai modal usaha tani yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk komoditas lain atau usaha lain yang produktif, sehingga mempunyai peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar. Hasil survai menunjukkan bahwa petani dengan status lahan milik sendiri mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.254 ribu (Rp.340 ribu - Rp. 3.075 ribu), sedangkan petani dengan status penggarap mempunyai penghasilan rata-rata Rp.1.320 ribu (Rp.428 ribu - Rp. 2.268 ribu).

Pembinaan PPL terhadap petani/kelompok tani berperan terhadap kemandirian kelompok tani, sosialisasi KUT Pola Khusus, serta keberhasilan usaha tani. Analisis model Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas atau frekuensi pembinaan yang dilakukan PPL semakin besar peluang petani dapat melunasi kredit.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diambil dari sejumlah 152 petani sampel KUT Pola Khusus, maka beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Petani lebih menyukai pemberian KUT Pola Khusus dalam bentuk uang tunai. KUT Pola Khusus telah berhasil meningkatkan penggunaan saprodi serta meningkatkan produksi dan pendapatan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian KUT Pola Khusus oleh petani adalah kelas kelompok petani, status apakah petani pernah memperoleh KUT Umum atau tidak, petani mempunyai tabungan di KUD dan di kelompok tani atau tidak, keikutsertaan petani dalam menyusun RDKK atau tidak, bentuk kredit yang diterima, saat petani menerima kredit, frekuensi ikut pertemuan, komoditas yang diusahakan, status penguasaan dan luas lahan, serta frekuensi pembinaan dari KUD dan PPL.

Rekomendasi

Peranan kelompok tani perlu lebih ditingkatkan. Apabila diperlukan, KUD dan bank pemberi kredit khususnya, memberikan latihan-latihan untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberian KUT Pola Khusus serta meningkatkan penyaluran KUT Pola Khusus.

Mengingat KUT Pola Khusus telah memberikan dampak yang positif bagi peningkatan produksi dan pendapatan petani, maka pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia perlu mempertahankan skim kredit ini untuk lebih menjamin swasembada pangan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian, maka beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pengembalian kredit oleh petani di antaranya adalah sebagai berikut :

- (1). Meningkatkan partisipasi petani dalam menabung di KUD atau di kelompok lain;
- (2). Meningkatkan partisipasi petani dalam penyusunan RDKK;
- (3). Mengusahakan pemberian kredit sebelum musim tanam;
- (4). Meningkatkan frekuensi pembinaan dari KUD atau PPL.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. D. 1984. Are The Arguments For Cheap Agricultural Credit ? In Undermining Rural Development With Cheap Credit. Westview Press, Inc. London.
- Adriani, R. 1996. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Pedesaan. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.
- Hardy, M. 1993. Regressian With Dummy Variables. Sage Publication, Inc. Newburry Park, California.
- Kane, J. E. 1984. Political Economy of Subsidizing Agricultural Credit in Developing Countries In Undermining Rural Development With Cheap Credit. Westview Press, Inc. London.
- Kmenta, J. 1977. Introduction to Econometrics. Mac Millan Publishing Inc. New York.
- Sanim, B dkk. 1997. Studi Evaluasi Pelaksanaan KUT Pola Khusus. Kerja sama Bank Indonesia LP IPB. Jakarta.
- Saragih, B dan S. Sunito. 1994. Social Economic Aspects of the Social Forestry Program in Java . Faculty of Forestry, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan sebagian dari hasil laporan penelitian yang berjudul Studi Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usahatani (KUT) Pola Khusus yang merupakan kerja sama antara Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor dengan Bank Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Peneliti yang telah memberikan izin untuk penulisan artikel ini.